

# Pengaruh Tingkat Pengangguran Pada Perekonomian Indonesia

Nafisah Lubis <sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [itschak.30@gmail.com](mailto:itschak.30@gmail.com)

Elvita Azzahra Lubis <sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [elvitaazzahra1603@gmail.com](mailto:elvitaazzahra1603@gmail.com)

**Abstract.** As a participant in the G20 Group and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Indonesia actively supports sustainable economic growth. However, this nation has problems in absorbing labor, giving rise to concerns about poverty which can endanger social and political stability and impact the welfare of its population. Therefore, a study of the problem of poverty is needed. The aim of this research is to determine the effect of inflation, minimum wages in each province, and HDI (Human Development Index) on poverty levels in Indonesia. Using data collected from thirty-three provinces in 2015 and 2018, this research uses a panel-based regression technique with inflation, HDI, and provincial minimum salary as independent variables. Poverty is identified as the dependent variable. The findings of this study validate the effects of the fixed equality approach and demonstrate the large and detrimental impact of HDI and inflation on poverty in Indonesia. On the other hand, there is no real impact of the provincial minimum wage on poverty levels in this country. Governments can invest in developing people's skills and education, optimizing regional possibilities, and implementing efficient regulations to fight poverty. This research aims to determine the impact of inflation, minimum wages in each province, and the HDI, or Human Development Index, on poverty levels in Indonesia. Using data collected from 33 provinces between 2015 and 2018, this research uses panel data regression techniques with inflation, HDI and provincial minimum wages as independent variables. The dependency factor found was poverty. The conclusions of this research support the application of the fixed impact method and show how inflation and HDI have a significant negative influence on the number of poor people in Indonesia. In contrast, the provincial minimum salary does not have a significant effect on the national poverty level. To combat impoverishment, government agencies can invest in individual education and skills development, maximize local opportunities, and implement effective laws.

**Keywords :** Unemployment, Economic, Indonesia

**Abstrak.** Sebagai peserta Grup G20 dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Indonesia secara aktif mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Namun bangsa ini memiliki permasalahan dalam penyerapan tenaga kerja sehingga menimbulkan kekhawatiran akan pengangguran yang dapat membahayakan stabilitas sosial dan politik serta berdampak pada kesejahteraan penduduknya. Oleh karena itu, diperlukan kajian terhadap masalah kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh inflasi, upah minimum di setiap provinsi, dan HDI (Indeks Pembangunan Manusia) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari tiga puluh tiga provinsi pada tahun 2015 dan tahun 2018, penelitian ini menggunakan teknik regresi berbasis panel dengan inflasi, IPM, dan gaji minimum provinsi sebagai variabel independen. Kemiskinan diidentifikasi sebagai variabel dependen. Temuan penelitian ini memvalidasi kesesuaian pendekatan efek tetap dan menunjukkan dampak HDI dan inflasi yang besar dan merugikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Di sisi lain, tidak ada dampak nyata upah minimum provinsi terhadap tingkat kemiskinan di negeri ini. Pemerintah dapat berinvestasi dalam mengembangkan keterampilan dan pendidikan masyarakat, mengoptimalkan kemungkinan-kemungkinan regional, dan memberlakukan peraturan yang efisien untuk memerangi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak inflasi, upah minimum di setiap provinsi, dan IPM, atau Indeks Pembangunan Manusia, terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Dengan memakai data yang dikumpulkan dari 33 provinsi antara tahun 2015 dan 2018, penelitian ini menggunakan teknik regresi data panel dengan inflasi, IPM, dan upah minimum provinsi sebagai variabel independen. Faktor dependen yang ditemukan adalah kemiskinan. Kesimpulan dari penelitian ini mendukung penerapan metode dampak tetap dan menunjukkan bagaimana inflasi dan IPM mempunyai pengaruh negatif yang signifikan ke jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Sebaliknya, gaji minimum provinsi tidak memiliki pengaruh yang signifikan di tingkat kemiskinan nasional. Untuk memerangi kemiskinan, lembaga pemerintah dapat melakukan investasi dalam pendidikan individu dan pengembangan keterampilan, memaksimalkan peluang lokal, dan menerapkan undang-undang yang efektif.

**Kata Kunci:** Pengangguran, Ekonomi, Indonesias

## **PENDAHULUAN**

Setiap negara tidak terhindar dari berbagai masalah yang kompleks yang erat kaitannya dengan penduduknya. Sepanjang proses pembangunan, Indonesia berjuang dengan sejumlah tantangan, dan salah satunya adalah masalah kriminalitas. Faktor yang memperburuk situasi ini ialah taraf pengangguran yang tinggi di Indonesia (Irawati et al., 2003). Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi tugas yang sangat berat untuk mengatasi masalah pengangguran, dengan tingkat pengangguran yang tetap tinggi, terutama di wilayah padat penduduk seperti Jawa Barat (Kasanah et al., 2009).<sup>1</sup>

Masalah ekonomi yang tidak lazim, khususnya yang terkait dengan pengangguran, muncul di provinsi Jawa Barat. Meningkatnya pemutusan hubungan kerja, yang dikenal sebagai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK, saat ini menimbulkan kekhawatiran di berbagai sektor masyarakat, melibatkan perspektif perusahaan dan buruh. Situasi ini memiliki dampak yang mendalam pada ekonomi negara (Aisyaturridho, 2021).<sup>2</sup>

Manifestasi masalah pengangguran terlihat dari kenaikan tingkat pengangguran terbuka yang terjadi setiap tahun. Pengangguran di suatu negara muncul ketika peluang pekerjaan yang tersedia di suatu wilayah tidak mencukupi permintaan tenaga kerja, menyebabkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan pekerjaan (Hikmah et al., 2021).

Tingginya tingkat pengangguran mencerminkan perpaduan tantangan ekonomi dan sosial. Dari segi ekonomi, tingginya tingkat pengangguran mengakibatkan pemborosan barang dan jasa yang seharusnya dapat diproduksi oleh pekerja yang menganggur. Secara sosial, pengangguran menimbulkan hambatan besar, memaksa individu yang menganggur menghadapi penderitaan yang signifikan karena harus diimbangi dengan pendapatan yang tidak mencukupi. Dampak ekonomi dari pengangguran sangat besar, melampaui sekadar kuantifikasi moneter dan menyoroti dampak psikologis dan manusiawi bagi mereka yang mengalami pengangguran (Samuelson, 2008).<sup>3</sup>

Kekompleksan masalah pengangguran menjadikannya subjek yang menarik dan multifaset, terkait dengan berbagai indikator ekonomi. Beberapa indikator ekonomi yang memengaruhi tingkat Pengangguran terbuka mencakup sejumlah faktor ialah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi (EG), Upah Minimum Pekerja (UMP), Inflasi, juga faktor-

---

<sup>1</sup> "Panduan Mitigasi Pengangguran Melalui Kewirausahaan," oleh Sudradjat, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, hal. 130.

<sup>2</sup> Weni Hawariyuni, Ahmad Albar Tanjung, and Aisyaturridho. "Analysis of the Effect of Economic Growth, Minimum Wage, and Human Development Index on Unemployment Rates in North Sumatra Province." (Page 114; Medan: Jurnal Samudra Ekonomika, 2021).

<sup>3</sup> Samuelson, "Ilmu Makro Ekonomi", Terjemahan, (Yogyakarta: Media Global Edukasi, 2018), Hlm. 173.

faktor lainnya. (Marliana, 2022).<sup>4</sup>

Dari penelitian sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa kenaikan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan inflasi berpotensi mengakibatkan perlambatan perkembangan ekonomi (Diva Abigail Yuanda & Haryatiningsih, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa penduduk akan mengalami kelelahan yang semakin meningkat secara progresif jika isu-isu seperti pengangguran dan kemiskinan diabaikan. Dari segi ekonomi, daya beli mereka akan menurun, sehingga sulit untuk memenuhi standar hidup minimum. Secara psikologis, individu akan mengalami ketidaknyamanan mental yang sulit diatasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan mengeksplorasi jalur ekonomi alternatif (HM, 2018).

Masalah pengangguran merupakan permasalahan yang kompleks dan banyak dimensi, melibatkan tidak hanya aspek ekonomi tetapi juga dimensi sosial. Pengangguran merupakan tantangan yang serius di hampir setiap negara, termasuk negara maju, dan khususnya mencolok di negara berkembang seperti Indonesia. Pengangguran meluas di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagai contoh, provinsi Jawa Barat terus menghadapi tantangan pengangguran, terlihat dari tingkat pengangguran yang tinggi secara konsisten setiap tahun.<sup>5</sup>

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Pengangguran

Menurut Sadono Sukirno, seseorang atau individu yang berada dalam rentang usia kerja namun belum memperoleh pekerjaan dapat dianggap sebagai pengangguran.<sup>6</sup> Dalam konteks indikator statistik, penduduk atau individu yang belum terlibat dalam kegiatan pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan, atau yang bukan sedang mengejar pekerjaan karena dianggap sudah bekerja tapi belum memulai tugasnya, akan dikategorikan sebagai pengangguran.<sup>7</sup>

Secara umum, inisiatif yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi pengangguran di negara ini telah mencapai kesuksesan relatif, terutama dalam menciptakan peluang pekerjaan, meskipun tidak semua individu dapat ditempatkan di pasar kerja. Menurut data

---

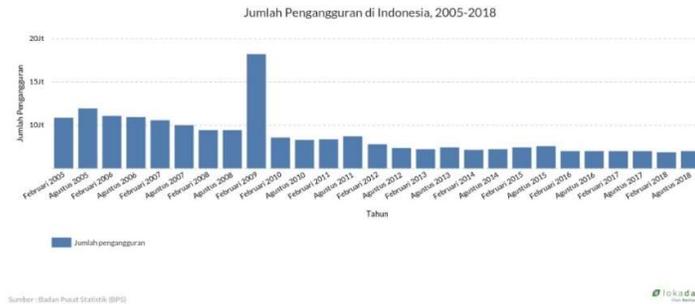
<sup>4</sup> Lina Marliana, "Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (2022), hal.87.

<sup>5</sup> Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Terbuka, Baihawafi Muhammad, Frida Shadow Asnita, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* Unisba Press, 2023, hal. 40.

<sup>6</sup> Franita Riska, "Analisis Pengangguran di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial*, vol. 1, tidak. 12, 2016, hal.89-90.

<sup>7</sup> A Landasan Teori, and Teori Pengangguran, 8. 2" (n.d.),hlm. 15.

dari BPS RI, terjadi penurunan signifikan dalam tingkat pengangguran di Indonesia selama satu dekade terakhir. Pada tahun 2005, tingkat pengangguran mencapai 10,3% (dari total jumlah usia kerja), menurun menjadi 7,0% (dari total jumlah usia kerja) pada tahun 2015.<sup>8</sup>



Tetapi, tantangan masih ada pada mencapai penyerapan tenaga kerja yang optimal meskipun terdapat peluang pekerjaan yang tersedia. Laporan Doing Business di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh World Bank dan IFC (2012), mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menghambat penyerapan tenaga kerja, seperti kekurangan tenaga kerja terdidik, infrastruktur yang kurang memadai, juga bagian kebijakan yang rumit. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian oleh Purna et al. (2010), yang menunjukkan bahwa Link and Match (keterkaitan dan kecocokan) yang kurang memadai antara sektor pendidikan dan dunia bisnis, di antara masalah-masalah lainnya, berkontribusi pada rendahnya penyerapan tenaga kerja.<sup>9</sup>

Menanggapi isu-isu terkait ketenagakerjaan dan pengangguran ini sangat penting untuk membahas hambatan-hambatan yang menghalangi penciptaan peluang pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, dan pengangguran. Diskusi ini bertujuan untuk memperkuat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara.<sup>10</sup>

## 2. Pengertian Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan mempunyai banyak segi dan rumit. Kemiskinan dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan.<sup>11</sup> Banyak faktor penyebab yang berkontribusi terhadap kemiskinan, yang dapat diukur dengan menggunakan berbagai

<sup>8</sup> “Metodologi Penelitian,” oleh V. Wiratna Sujarweni, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2014.

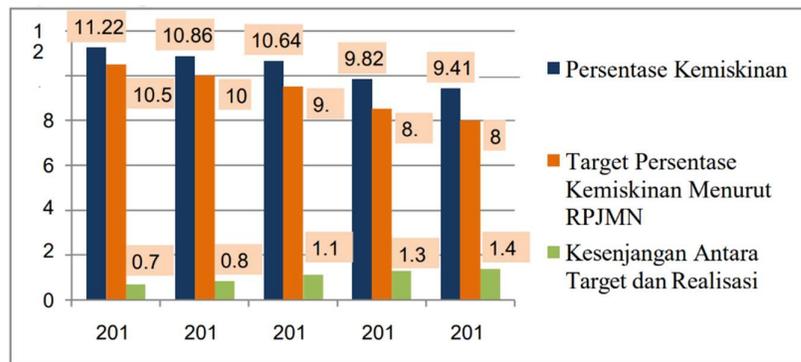
<sup>9</sup> Fatmi Ratna Ningsih, —“Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Indonesia periode tahun 1988-2008.”

<sup>10</sup> Suhandi, Wahyu Wiguna, Icin Quraysin, “Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan (2021), hlm. 270.

<sup>11</sup> Ernawati, Natalie. “Pemetaan Potensi Penduduk Miskin Kabupaten Bantul.” (Yogyakarta: Jurnal Bumi Indonesia, 2013; volume 1, edisi 3, halaman 10–12

metrik.<sup>12</sup> Hal ini tergantung pada kondisi kehidupan masyarakat miskin, termasuk lokasi mereka di pedesaan atau perkotaan dan apakah mereka sendirian atau menjadi bagian dari keluarga kecil.<sup>13</sup>

Ketika seseorang atau kelompok tidak mencapai standar minimum kebahagiaan finansial, hal ini disebut kemiskinan. Strategi Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang merupakan cerminan strategi kerja pemerintah kini mengutamakan upaya pengurangan kesenjangan di Indonesia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kemudian membagi RPJPN menjadi empat tahap, dengan tahap ketiga yang berlangsung pada tahun 2015 hingga 2019. Informasi mengenai tingkat kemiskinan di Indonesia dapat dilihat di bawah ini:



Pada Gambar 1.1, terlihat yaitu persentase kemiskinan mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2015, kemudian mengalami penurunan bertahap hingga tahun 2019. Namun, penurunan tersebut tidak mencapai target pemerintah sebesar 8% yang ditetapkan untuk tahun 2019. Data juga menunjukkan adanya peningkatan kesenjangan antara target penurunan kemiskinan dan pencapaian sebenarnya dari tahun 2015 hingga 2019. Beberapa ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Pertama, menurut Malthus, pertumbuhan penduduk ialah salah satu faktor yang memengaruhi kemiskinan. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat berdampak negatif pada ketersediaan makanan, akhirnya menyebabkan kemiskinan kronis.<sup>14</sup> Kedua, perbedaan kepemilikan sumber daya yang menyebabkan disparitas distribusi pendapatan dan kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan Indeks

<sup>12</sup> “Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kepadatan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi,” Rahma Wardana Putri dkk., 8, no. 2 (2019), hal. 11.

<sup>13</sup> “Kemiskinan dan Penyebabnya,” El Adawiyah, 1, no. April (2020), hlm.43–50.

<sup>14</sup> Vania Grace Sianturi, M. Syafii, Ahmad Albar Tanjung, “Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus (2016-2019),” (Medan : Jurnal Samudra Ekonomika, hlm. 126

Pembangunan Manusia (IPM) dinilai Kuncoro ialah faktor yang signifikan mempengaruhi kemiskinan. Ketiga, menurut Mankiw, peningkatan PDB akan meningkatkan nilai keseluruhan komoditas dan jasa yang dihasilkan, yang dapat digunakan untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Sukirno menekankan sekali lagi bahwa kemiskinan merupakan faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Jika kondisi pemanfaatan tenaga kerja yang optimal terpenuhi, masyarakat dapat mencapai potensi pendapatan terbesarnya. Maka dari itu, penulis terpicat untuk membahas bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kemiskinan di Indonesia pada tahun 2016 hingga 2019.

### **3. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Sebagai indikator arah masa depan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memperhitungkan faktor-faktor termasuk harapan hidup, tingkat pendidikan, dan kapasitas untuk mencapai pengaruh sehari-hari.<sup>15</sup> Indikator empat yang memperhatikan aspek umur, pengetahuan, dan taraf hidup yang baik dan sehat kemudian mencerminkan hal tersebut.<sup>16</sup>

Instrumen penting guna mengevaluasi kebijakan pembangunan ialah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang memberikan data tentang seberapa baik program kegiatan dan anggaran dilaksanakan. Selain berfungsi sebagai indikator kinerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga merupakan instrumen penting bagi pemerintah karena dapat menyatukan masyarakat yang kurang terlayani atau memotivasi mereka untuk mencapai tujuan pembangunan. Dengan kata lain, pengeluaran pembangunan dapat didistribusikan melalui HDI.<sup>17</sup>

Program Kemajuan PBB (UNDP) awalnya menetapkan konsep pengukuran kemajuan manusia pada tahun 1990. UNDP meluncurkan Indeks Pertumbuhan Manusia (HDI), sebuah metode baru untuk mengukur pertumbuhan manusia. Laporan Pembangunan Manusia (HDR) secara konsisten memasukkan HDI sejak saat itu. Terkait dengan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan bidang lainnya, HDI berupaya untuk mengkarakterisasi akses masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.<sup>18</sup>

### **4. Penyebab Kemiskinan**

Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor kompleks dan multidimensional.

<sup>19</sup>Beberapa penyebab umum kemiskinan melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan politik.

---

<sup>15</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks\\_Pembangunan\\_Manusia](https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia)

<sup>16</sup> "Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi 2019", hlm. 3

<sup>17</sup> Berita Resmi Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2016. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016

<sup>18</sup> United Nations Development Programme, 2015. "Human Development Report: Work for Human Development 2015". UNDP, New York.

<sup>19</sup> A. P. Adit, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan (studi kasus 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah 2003-2007)" (2010). Perihal: 114

Berikut adalah beberapa faktor penyebab kemiskinan: <sup>20</sup>

1. Kurangnya Kesempatan Pendidikan. Ketidakmampuan untuk mengakses atau menyelesaikan pendidikan dapat membatasi peluang pekerjaan dan penghasilan.
2. Ketidaksetaraan Ekonomi. Pembagian yang tidak merata dari sumber daya ekonomi, pendapatan, dan kekayaan dapat menciptakan kesenjangan ekonomi yang menyebabkan kemiskinan.<sup>21</sup>
3. Pengangguran dan Ketidakstabilan Pekerjaan. Ketidakmampuan untuk mendapatkan pekerjaan atau pekerjaan yang tidak stabil dapat mengakibatkan kurangnya penghasilan dan ketidakpastian ekonomi.
4. Kesehatan yang Buruk. Biaya perawatan kesehatan yang tinggi dan kurangnya akses ke layanan kesehatan dapat menjadi penyebab kemiskinan, terutama jika seseorang tidak dapat bekerja karena masalah kesehatan.
5. Ketidaksetaraan Gender. Diskriminasi gender dan ketidaksetaraan dalam kesempatan pendidikan dan pekerjaan dapat menyebabkan kemiskinan, terutama pada perempuan.
6. Krisis Ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi, resesi, atau krisis keuangan dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan, penurunan penghasilan, dan kemiskinan secara luas.
7. Ketidaksetaraan Akses ke Sumber Daya. Keterbatasan akses ke lahan, air bersih, energi, dan infrastruktur dasar lainnya dapat memperburuk kemiskinan.
8. Korupsi dan Ketidakstabilan Politik. Korupsi dan ketidakstabilan politik dapat menghambat pembangunan ekonomi dan menciptakan ketidakpastian, berkontribusi pada kemiskinan.
9. Perubahan Iklim. Bencana alam dan perubahan iklim dapat merusak pertanian, infrastruktur, dan sumber daya lainnya, yang dapat memperburuk kemiskinan.
10. Siklus Kemiskinan. Kemiskinan dapat menjadi suatu siklus, di mana generasi-generasi berikutnya sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan karena keterbatasan akses ke pendidikan dan peluang ekonomi.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Yenny Dharmayanti. "Analisis Pengaruh PDRB, Upah Dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1991-2009."

<sup>21</sup> "Teori Makro Suatu Pengantar" oleh Prathama Rahardja dan Mandala Manurung (Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI, 2008), hal. 178.

<sup>22</sup> Gonner, CH, dan Cahyat, A. (2007). Menganalisis Kesejahteraan dan Kemiskinan Rumah Tangga. Pusat Penelitian Kehutanan Internasional

Penting untuk diingat bahwa kemiskinan sering kali kompleks dan bersifat saling terkait, dan solusi yang efektif memerlukan pendekatan holistik dan berbasis masyarakat.<sup>23</sup>

## **5. Kondisi Perekonomian Indonesia**

Perkembangan ekonomi Indonesia hingga saat ini mencerminkan suatu perjalanan panjang yang menjadi indikator efektivitas kinerja pemerintah pada masa itu di bawah kepemimpinan seorang presiden dan kabinetnya, sebagaimana tercermin dalam sebuah artikel jurnal berjudul "Survey on Recent Developments. (Kuncoro & Resosudarmo, 2006)<sup>24</sup> dengan mengacu pada berbagai sumber dan artikel pendukung yang tercantum dalam referensi, diharapkan penelitian ini dapat menyelidiki dan membahas secara mendalam topik yang menjadi judul makalah ini.<sup>25</sup>

Dalam artikel Kuncoro & Resosudarmo (2006), Pergantian tersebut dilakukan sebagai respons terhadap persepsi publik terkait kinerja sebelumnya yang dianggap kurang efektif, dengan berbagai alasan dan latar belakang yang beragam. Meskipun beberapa faktor telah diidentifikasi sebagai penyebab dari persepsi ini, seperti keterlambatan pembayaran atau pengeluaran pemerintah yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. (terlihat dari pertumbuhan konsumsi pemerintah yang tinggi pada awal semester 2005), Situasi ini mengakibatkan departemen pemerintah, baik pada tingkat pusat ataupun daerah, tidak dapat secara optimal memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan.

## **6. Hubungan PDB, IPM, Pengangguran, dan Kemiskinan**

Suliswanto (2010) menemukan adanya korelasi negatif antara tingkat kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), & Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada hal ini, faktor terpenting yang perlu dipertimbangkan ketika menilai derajat kemiskinan adalah variabel IPM. Namun penelitian yang dilakukan oleh Syaifullah dan Malik (2017) menunjukkan bahwa meskipun PDB mempunyai hubungan yang tidak menguntungkan dengan ketimpangan pendapatan, HDI tidak mempunyai pengaruh terhadap hal tersebut.<sup>26</sup> Susanti Sussy (2013) menemukan bahwa IPM, PDRB, juga ketimpangan pendapatan berimbang signifikan kepada tingkat kemiskinan di Jawa Barat. Dalam penelusurannya, Alhudori (2017) menemukan bahwa kuantitas kemiskinan di Provinsi Jambi dipengaruhi oleh IPM, PDRB, dan derajat kemiskinan. Kesimpulan penelitian Wirawan dan Arka

---

<sup>23</sup> Fitrayati Dhiyah Qomariyah Isti. hubungan antara tingkat kemiskinan di Jawa Timur dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi.

<sup>24</sup> Kuncoro, Resosudarmo. (2006). *The Political Economy of Indonesian Economic Reforms: 1983-2000*, Oxford Development Studies, Hlm. 345

<sup>25</sup> Engla Desnim Silvia, dkk, —Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Inflasi di Indonesia, hlm. 224.

<sup>26</sup> Ida Nagus Putu Purbadharmaja, Obata Laksmi Dewi. Dampak inflasi, PMA, dan pad terhadap pembangunan perekonomian Provinsi Bali

(2015) di Provinsi Bali juga mendukung kesimpulan yang sama mengenai hubungan PDRB dengan tingkat pendapatan.<sup>27</sup>

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam studi ini, peneliti mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif dan menerapkan metode kajian pustaka. yang sering disebut sebagai penelitian perpustakaan. Penelitian kualitatif menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena atau peristiwa sosial tertentu. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti menggunakan data sekunder seperti buku, artikel jurnal, dokumen, dan sumber informasi lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian. Penggunaan metode pengumpulan data studi pustaka umum dalam penelitian kualitatif. Dengan merujuk pada penelitian sebelumnya yang relevan, peneliti dapat membangun landasan teoritis dan kontekstual untuk penelitian yang sedang dilakukan.

## **PEMBAHASAN**

Prinsipnya, harapannya adalah bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menyebabkan penyerapan tenaga kerja, kemudian mengecilkan tingkat pengangguran.<sup>28</sup> Pengukuran perkembangan ekonomi di Indonesia melibatkan pemantauan kenaikan atau penurunan Produk Domestik Bruto (PDB), yang mencerminkan nilai keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara. Hal ini karena indikator yang terkait dengan tingkat pengangguran sering kali berkorelasi dengan PDB.<sup>29</sup>

Terdapat temuan yang bertentangan mengenai jalinan terkait perkembangan ekonomi dan taraf kemiskinan menurut sejumlah penelitian sebelumnya. Banyak hasil yang menunjukkan adanya hubungan, positif atau negatif, terkait ekspansi ekonomi dan taraf kemiskinan. Jika perkembangan PDB tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas produksi, maka terdapat hubungan yang positif. Oleh karena itu, angka kemiskinan meningkat seiring dengan ekspansi ekonomi. Meningkatnya ekspansi ekonomi ini sebagian besar didorong oleh strategi yang berorientasi pada modal, dimana operasi manufaktur memprioritaskan peningkatan pendapatan dan output dibandingkan menciptakan lapangan kerja.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, dan Produk Regional Bruto terhadap Kemiskinan di Jawa Barat Melalui Analisis Data Panel, Susanti, S. (2013). *Jurnal Matematika Integratif*, 9(1), 1–18.

<sup>28</sup> Rima Kurniasari Ditha. Kajian mengenai pengaruh suku bunga, inflasi, nilai tukar rupiah, dan investasi terhadap pembangunan perekonomian Indonesia.

<sup>29</sup> Pramesthi Rovia Nugrahani, Cahyono Hendry. Dampak inflasi dan pelemahan terhadap pertumbuhan perekonomian Kabupaten Trenggalek.

<sup>30</sup> Malik N. dan A. Syaifullah 2017. Studi yang dilakukan di empat negara ASEAN untuk menguji dampak Indeks

Beberapa penelitian yang menunjukkan jalinan negatif terkait perkembangan ekonomi juga tingkat penurunan beranggapan bahwa perkembangan ekonomi di Indonesia menciptakan lapangan kerja atau menawarkan pilihan lapangan kerja dengan fokus yang lebih kuat pada penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, ekspansi ekonomi diperkirakan dapat menurunkan angka kemiskinan.<sup>31</sup>

Berdasarkan data nasional.kontan.co.id, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun 2020 mengalami defisit. Berdasarkan data nasional.kontan.co.id, surplus APBN Indonesia di tahun tersebut naik sampai 6,27% terhadap PDB. Pemberlakuan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan guna memitigasi imbas epidemi virus corona di seluruh dunia di Indonesia juga terkait dengan peningkatan surplus tersebut.<sup>32</sup>

### **Kondisi Pengangguran di Indonesia**

Sekitar 237 juta orang menganggap Indonesia sebagai rumah, menurut data jajak pendapat Badan Pusat Statistik tahun 2010. Tingkat kemiskinan dan kemajuan ekonomi berkorelasi dengan kehadiran masyarakat Indonesia. Terdapat lebih dari 224 juta orang yang tinggal di Indonesia pada tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2007. Lebih banyak orang yang hidup dalam kemiskinan mungkin disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk yang melebihi jumlah lapangan kerja yang tersedia menjadi penyebab meningkatnya angka kemiskinan.

Hal lain yang bisa menyebabkan tingginya tingkat pengangguran ialah keadaan kawasan di sebuah negara. Dalam konteks pandemi covid19, aktivitas ekonomi mengalami penurunan & hambatan. Meskipun banyak perusahaan yang tetap beroperasi, namun pendapatan mereka menurun. Hal ini menyebabkan perusahaan kesulitan untuk membiayai gaji atau upah karyawan. Akhirnya, banyaknya perusahaan yang memutuskan untuk melakukan pemecatan terhadap karyawan. PHK dapat terjadi di berbagai sektor, baik yang bersifat formal maupun nonformal.<sup>33</sup>

---

Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Bruto terhadap tingkat kemiskinan. Edisi Pertama Jurnal Ilmu Ekonomi, 107–119.

<sup>31</sup> Analisis Dampak Pendidikan Terhadap PDRB Per Kapita oleh Wirawan, IMT, dan Sudarsana A. (2015). Selain itu, *EJournal of Development Economics*, Universitas Udayana, 4(5), 546–560, membahas mengenai tingkat pengangguran terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Bali.

<sup>32</sup> Arisman, 2018. Penentu Indeks Pembangunan Manusia Negara-Negara ASEAN. *penting*. 7(1), 113–122 dalam *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 10.15408/sjie.v7i1.675

<sup>33</sup> Bank Dunia. 2019. *Overview The World Bank In Indonesia*. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview>.

Karyawan dalam sektor formal melibatkan individu yang bekerja sebagai pekerja tetap dengan bantuan, termasuk juga mereka yang berperan sebagai buruh, karyawan, dan pejabat. Di sisi lain, individu dalam sektor informal merujuk pada mereka yang bekerja secara mandiri, menjadi buruh tidak tetap dengan bantuan, pekerja lepas, dan pekerja tanpa bayaran.<sup>34</sup>

Pemutusan hubungan kerja memiliki konsekuensi bagi para karyawan, menyebabkan mereka terdampak oleh PHK dan kehilangan pekerjaan, sehingga dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Istilah "pengangguran" digunakan karena mereka mencari opsi pekerjaan alternatif setelah kehilangan pekerjaan sebelumnya. Perusahaan melakukan PHK untuk meredakan beban keuangan di tengah pandemi. Beberapa perusahaan telah melakukan PHK yang mempengaruhi puluhan atau bahkan ratusan karyawan.<sup>35</sup>

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), pekerja formal berstatus PHK sementara sebanyak 1.205.191 orang dan pegawai sektor dinas menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 212.394 orang. Sekitar 282.000 orang di pasar tenaga kerja informal tidak memiliki penghasilan apa pun, menurut Kementerian Tenaga Kerja. Selain itu, menurut statistik BP Jamsostek, 454.000 pegawai resmi diberhentikan atau diberhentikan, sementara 537.000 orang diberhentikan di sektor non-formal.<sup>36</sup> Fakta bahwa terdapat lebih banyak pekerja di sektor informal di Indonesia yaitu 71,7 juta, atau sekitar 56,7% dari keseluruhan angkatan kerja dibandingkan di sektor formal, merupakan pengamatan yang menarik. Berdasarkan data tahun 2018, 89% di antaranya bergerak di bidang usaha kecil. Sejumlah industri telah melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terkait efek pandemi COVID Nineteen yang mengakibatkan banyaknya lapangan pekerjaan yang hilang di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi ini. Sekitar 71,7 juta pekerja telah diberhentikan, sehingga mereka yang berada di sektor perekonomian informal adalah pihak yang paling terkena dampaknya. Lebih dari 1,5 juta pekerja diberhentikan sementara atau menghadapi PHK secara keseluruhan, menurut nasional.kontan.co.id. Sekitar 1,2jt karyawan lahir dari industri resmi & 265.000 dari sektor tidak resmi, yang menunjukkan bahwa industri yang diatur memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan sektor tidak resmi.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Deny S., Hainim K., dan V.A. Riva (2014). Dampak Upah Minimum Provinsi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau. 1-15; JOM FEKON, 1(2).

<sup>35</sup> Shinta et al., 2021 Shinta, A. D., Suryantoro, A., & Mulyanto. (2021). "The Effect of Educational Technology Development and Economic Growth on Open Unemployment in Indonesia. Budapest International Research and Critics Institute-Journal", 4(2), 32931–32943.

<sup>36</sup> Maria, Elena. 2020: Pandemi Covid-19, Inilah Sektor-Sektor Yang Terkena PHK. Sektor persewaan ruang di Filipina termasuk salah satu sektor yang terkena dampak pandemi COVID-19. [Diakses: 15 Juni 2020].

<sup>37</sup> Silpa Hanoatubun. Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia, 2020. Jurnal Pendidikan, Psikologi, dan Konseling: Volume 2, Edisi 1. ISSN Online: 2716-4446

Banyak hal yang bisa memicu permasalahan kemiskinan, seperti PHK yang memperburuk keadaan keuangan rumah. Persoalan pengangguran merupakan persoalan yang rumit dan memiliki banyak tanda yang berkorelasi. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu variabel ekonomi yang mempengaruhi kedudukan perekonomian suatu negara. Ada harapan bahwa perkembangan ekonomi yang lebih tinggi mau berkontribusi di penurunan tahap kemiskinan di suatu negara. Namun dalam kondisi saat ini yang disebabkan oleh epidemi virus corona, pembangunan ekonomi telah melambat. Hal ini berarti bahwa penurunan keadaan perekonomian yang membaik dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan.<sup>38</sup>

Pada triwulan I tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia lamban sekitar 2,97% (year on year). Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,41% dibandingkan bulan keempat tahun 2019, ketika tingkat pertumbuhan sebesar 5,02%. Tingkat kemiskinan di Indonesia semakin meningkat seiring dengan perlambatan perekonomian.<sup>39</sup>

Meningkatnya angka kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab ketimpangan anggaran negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 menghadapi kekurangan yang semakin meningkat, yakni sebesar 6,27% PDB, menurut kontan.co.id.<sup>40</sup> Meningkatnya tingkat kemiskinan menyebabkan turunnya pendapatan rumah tangga dan, akibatnya, menurunnya tingkat pengeluaran rumah tangga, yang dapat berdampak pada laju ekspansi ekonomi secara keseluruhan.<sup>41</sup>

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis studi mengenai hubungan antara ekspansi ekonomi dan kemiskinan terbuka di Indonesia menunjukkan bahwa tidak ada hubungan sama sekali. Hubungan yang merugikan dan tidak signifikan secara statistik antara variabel tingkat kemiskinan terbuka dan variabel ekspansi ekonomi terungkap dalam temuan pengujian ini. Jelas dari korelasi negatif ini bahwa prevalensi kemiskinan tidak dipengaruhi oleh kemajuan ekonomi.

---

<sup>38</sup> Santoso, Yusuf Imam. 2020. Inilah delapan dampak negatif wabah virus corona terhadap perekonomian Indonesia: <https://nasional.kontan.co.id/news/inidelapan-dampak-negatif-bagiper-Ekonomian-indonesia-akibat-wabahvirus-corona> ! (17 Juli 2020).

<sup>39</sup> Amir Amri. 2007. Pengangguran Indonesia: Dampak Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi. Jil. 1, No. 1, 2007, Jurnal Inflasi Bendungan Pengangguran Jambi

<sup>40</sup> Sukirno, Sadono, Teori Makroekonomi Kontemporer. Indonesia: Raja Grafindo Persada PT., 2000.

<sup>41</sup> Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Dampak Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2011 hingga 2015 dianalisis oleh Ningrum, SS. 2017. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 15(2), hlm.184-192.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, El. Kemiskinan Dan Faktor Penyebabnya 1, no. April (2020): 43-50.
- Adit, A. P. (2010). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Kemiskinan (studi kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2003-2007)
- Aisyaturridho, Ahmad Albar Tanjung, & Weni Hawariyuni. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Samudra Ekonomika*
- Amri, Amir. 2007. Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Inflasi dan Pengangguran*. Vol. 1, No. 1, 2007, Jambi
- Arisman. 2018. Determinant of Human Development Index in ASEAN Countries. *Signifikan. Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7 (1), 113 – 122. doi: <http://dx.doi.org/10.15408/sjie.v7i1.675>
- B. Muhammad, F. S. Asnita. (2023) Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran Terbuka. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah Unisba Press*
- Bank Dunia. 2019. Overview The World Bank In Indonesia. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview>.
- Berita Resmi Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2016. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016
- Cahyat, A., & Gonner. C, H. (2007). Mengkaji Kemiskinan Dan Kesejahteraan Rumah Tangga. Center for International Forestry Research
- Dharmayanti, Yenny. 2011. Analisis Pengaruh PDRB, Upah dan Inflasi terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1991- 2009.
- Ditha, Rima Kurniasari. —Analisis pengaruh investasi, inflasi, nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- Elena, Maria. 2020. Dampak Pandemi Covid-19, Ini Sektor-sektor yang rentan kena PHK. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200415/9/1227629/dampak-pandemi-covid-19-ini-sektor-sektor-yang-rentan-kena-phk> (diakses tanggal 15 Juni 2020).
- Engla Desnim Silvia, dkk, —Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Inflasi di Indonesia, hlm. 224.
- Fatmi Ratna Ningsih,—Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Indonesia periode tahun 1988-2008.
- Franita, R. (2016). Analisa Pengangguran di Indonesia. *Jurnal ilmu Pengetahuan Sosial Volume 1*.
- Hanoatubun, Silpa. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Education, Psychology and Counseling*. Volume 2 Nomor 1. ISSN Online: 2716-4446 [https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks\\_Pembangunan\\_Manusia](https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia)
- Ii, B A B, A Landasan Teori, and Teori Pengangguran. “, 8. 2” (n.d.): 15-49
- Isti Qomariyah, Dhiah Fitrayati. —Pengaruh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Jawa Timur.
- Jambi,B.S.(2019). Indeks Pembangunan Manusia Provinsi jambi 2019. Jambi: Badan Statistik

Provinsi Jambi.

- Kuncoro, Resosudarmo. (2006). *The Political Economy of Indonesian Economic Reforms: 1983-2000*, Oxford Development Studies
- Marliana. L. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. *Journal of Economics and Business*.
- Muana Nanga, *Makro Ekonomi: TEORI, MASALAH DAN KEBIJAKAN*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- N. Ernawati. (2013). Pemetaan Potensi Penduduk Miskin Kabupaten Bantul. Bantul: *Jurnal Bumi Indonesia*.
- Ningrum, SS. 2017. Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 184 – 192.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. *Teori Makro Suatu Pengantar* (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2008), hlm. 178.
- Rahma Wardana Putri, J.d. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Kepadatan Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *e-Jornal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan* Vol.8, No.2.
- Riva, V.A, Hainim K. dan Deny S. 2014. Pengaruh Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau. *JOM FEKON*, 1(2), 1-15.
- Rovia Nugrahani Pramesthi, Hendry Cahyono. —Pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Trenggalek.
- Samuelson. (2008). *Ilmu Makro Ekonomi*, Terjemahan. Media Global Edukasi.
- Sakita Laksmi Dewi, Ida Nagus Putu Purbadharmaja. —Pengaruh pad, pma dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali.
- Santoso, Yusuf Imam. 2020. Ini delapan dampak negatif bagi perekonomian Indonesia akibat wabah virus Corona <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-delapan-dampak-negatif-bagi-perekonomian-indonesia-akibat-wabah-virus-corona> (diakses tanggal 17 Juli 2020).
- Sayifullah & Gandasari, 2016 Sayifullah, S., & Gandasari, T. R. (2016). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(2), 236–255. <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i2.4345>
- Shinta et al., 2021 Shinta, A. D., Suryantoro, A., & Mulyanto. (2021). The Effect of Educational Technology Development and Economic Growth on Open Unemployment in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 4(2), 32931–32943.
- Sianturi. V. G, Syafii .M, Tanjung. A. A. (2021). Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus (2016-2019). Medan : *Jurnal Samudra Ekonomika*
- Sudradjat. (2000). *Kiat Mengentaskan Pengangguran Melalui Wirausaha*. Bumi Aksara.
- Suhandi. Wiguna. W. Quraysin. I. (2021) *Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*.

- Sujarweni, V. Wiratna, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014. Sukirno, Sadono, Makroekonomi Modern. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Susanti, S. 2013. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel. *Jurnal Matematika Integratif*, 9(1), 1-18.
- Syahrullah, D. 2014. Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2009-2012. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Syaifullah, A dan Malik N. 2017. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Asean-4 (Studi Pada 4 Negara Asean). *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 107 – 119.
- United Nations Development Programme, 2015. Human Development Report: Work for Human Development 2015. UNDP, New York.
- Wirawan, IMT dan Sudarsana A. 2015. Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB Per Kapita. Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali, *EJurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(5), 546-560.
- Yuanda. D. A, Haryatiningsih. R. (2022). Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran, dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bandung 2005-2020. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis Unisba Press*.